



Dinamika Wacana Kemiskinan dan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Makassar: Perspektif Sosial dan Politik

Mario Mario

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

Korespondensi penulis: mariosm@unm.ac.id

Abstract. Poverty is a multidimensional problem that is not only related to economic aspects but also social and cultural. The Family Hope Program (PKH) in Makassar City is implemented as an effort to empower poor families through conditional assistance that requires active participation of recipients in fulfilling their children's education and health obligations. This study aims to analyze the construction of poverty discourse in the implementation of PKH, discourse contestation between social actors, and its impact on participation and legitimacy of the program. The research method used is qualitative with a descriptive approach, involving in-depth interviews and participatory observations of 15 beneficiaries and 3 social assistants in Makassar. The results of the study show that the official discourse of poverty based on administrative data often ignores the complexity of the experiences of the poor, thus giving rise to resistance and the emergence of counter-discourses that demand recognition of local narratives. This contestation has an impact on the limited space for dialogue and community participation, which results in the social legitimacy of PKH becoming fragile. Social assistants play an important role in facilitating inclusive communication and empowerment of beneficiaries, increasing their sense of ownership and active participation. In conclusion, the success of PKH is highly dependent on the transformation of poverty discourse to be more responsive and inclusive, strengthening the capacity of facilitators, and building a participatory deliberative public space to strengthen the legitimacy and effectiveness of the program.

Keywords: Family Hope Program, Legitimacy, Participation, Poverty, Social Discourse

Abstrak. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga sosial dan budaya. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Makassar diimplementasikan sebagai upaya pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan bersyarat yang menuntut partisipasi aktif penerima dalam memenuhi kewajiban pendidikan dan kesehatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi wacana kemiskinan dalam pelaksanaan PKH, kontestasi wacana antara aktor sosial, serta dampaknya terhadap partisipasi dan legitimasi program. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap 15 penerima manfaat dan 3 pendamping sosial di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana resmi kemiskinan yang berbasis data administratif seringkali mengabaikan kompleksitas pengalaman masyarakat miskin, sehingga menimbulkan resistensi dan munculnya wacana tandingan yang menuntut pengakuan narasi lokal. Kontestasi ini berdampak pada terbatasnya ruang dialog dan partisipasi masyarakat, yang mengakibatkan legitimasi sosial PKH menjadi rapuh. Pendamping sosial berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi inklusif dan pemberdayaan penerima manfaat, meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif. Kesimpulannya, keberhasilan PKH sangat bergantung pada transformasi wacana kemiskinan yang lebih responsif dan inklusif, penguatan kapasitas pendamping, serta pembangunan ruang publik deliberatif yang partisipatif untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas program.

Kata kunci: Kemiskinan, Program Keluarga Harapan, Wacana Sosial, Partisipasi, Legitimasi

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang paling kompleks dan multidimensional yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena kemiskinan tidak hanya terkait dengan keterbatasan ekonomi semata, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan politik yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kesejahteraan individu serta keluarga miskin. Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berbagai tantangan sosial ekonomi yang khas, menjadi

wilayah yang menjadi fokus berbagai program pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial sekaligus meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Program ini berupaya tidak hanya memberikan bantuan ekonomi tetapi juga memberdayakan keluarga penerima manfaat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik [BPS], 2020; Kementerian Sosial RI, 2020).

Konsep dasar PKH berakar pada teori perlindungan sosial yang dikembangkan oleh Karl Polanyi (1944), yang menekankan pentingnya peran intervensi negara dalam melindungi kelompok rentan dari risiko sosial-ekonomi di tengah dinamika pasar bebas yang sering kali tidak adil. Dalam konteks ini, PKH berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial yang berupaya menstabilkan kehidupan keluarga miskin sekaligus memberdayakan mereka melalui berbagai program pendukung yang menargetkan peningkatan kualitas hidup, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Berbagai studi dan evaluasi menunjukkan bahwa PKH telah memberikan dampak positif dalam meringankan beban ekonomi keluarga miskin dan memperluas akses mereka terhadap layanan dasar (Adhayati, Budiman, & Noorrahman, 2020; Mulyadi & Sari, 2021).

Pelaksanaan PKH tidak terlepas dari berbagai kendala yang menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program. Salah satu isu utama yang muncul adalah bagaimana wacana kemiskinan dibentuk dan dipraktikkan dalam konteks program ini. Wacana kemiskinan yang mendominasi pelaksanaan PKH cenderung bersifat administratif dan normatif, berorientasi pada data statistik dan kriteria kelayakan yang ketat. Pendekatan ini memang membantu dalam standarisasi dan pengelolaan program, namun sering kali mengabaikan kompleksitas realitas kehidupan sosial masyarakat miskin yang jauh lebih beragam dan dinamis (Setianingrum et al., 2025; Susilo & Suyono, 2019).

Dari sisi penerima manfaat, wacana administratif ini sering dirasakan sebagai bentuk kategorisasi mekanistik yang tidak mampu menggambarkan pengalaman hidup mereka secara utuh. Pendamping sosial di lapangan juga mengakui bahwa kriteria yang baku dan formal tidak selalu relevan dan tidak mengakomodasi kebutuhan mendesak serta konteks sosial budaya lokal yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari keluarga miskin (Pramesti, Kadir, & Suriyani, 2024; Mulyadi & Sari, 2021). Fenomena ini menggambarkan jarak antara kebijakan formal dan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat miskin, sehingga program PKH belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan riil mereka.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana sebenarnya wacana kemiskinan dibentuk dan dikonstruksi dalam pelaksanaan PKH di Kota Makassar, serta bagaimana konstruksi tersebut memengaruhi pemahaman tentang kemiskinan dan identitas sosial masyarakat miskin sebagai penerima manfaat program. Hal ini penting karena pemahaman terhadap kemiskinan yang hanya berfokus pada dimensi administratif dan ekonomi berpotensi mengabaikan dimensi sosial dan kultural yang sama pentingnya. Dalam kerangka teori konstruksi sosial realitas yang dikemukakan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann (1966), realitas sosial adalah hasil konstruksi bersama yang melibatkan makna dan narasi yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri, bukan sekadar hasil data statistik atau administrasi formal.

Penelitian ini juga ingin memahami bagaimana kontestasi wacana terjadi dalam praktik pemberdayaan PKH. Wacana resmi yang bersifat administratif kerap kali berhadapan dengan wacana tandingan yang muncul dari penerima manfaat, pendamping sosial, dan aktor masyarakat sipil. Wacana tandingan ini merupakan bentuk resistensi terhadap pelabelan dan kriteria yang dianggap tidak adil dan tidak sensitif terhadap konteks sosial budaya lokal. Proses dialektis antara wacana resmi dan tandingan ini bukan hanya menghasilkan konflik, tetapi juga membuka ruang bagi transformasi wacana yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman masyarakat miskin. Teori kekuasaan dan resistensi dari Michel Foucault (1980) sangat relevan dalam menjelaskan dinamika ini, di mana kekuasaan selalu diiringi oleh resistensi yang berpotensi melahirkan perubahan sosial. Peran pendamping sosial dan aktor masyarakat sipil sebagai mediator dalam dialog inklusif ini juga mendapat perhatian dalam kerangka teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas (1984), yang menekankan pentingnya komunikasi rasional dan partisipatif dalam membangun legitimasi sosial dan keberlanjutan program (Norlaili, Budiman, & Noorrahman, 2020).

Penelitian ini ingin mengkaji dampak wacana kemiskinan terhadap partisipasi dan legitimasi sosial program PKH. Dominasi wacana administratif yang kaku dan kurang memberikan ruang dialog kritis serta partisipasi aktif masyarakat berpotensi menghambat terbentuknya ruang publik deliberatif yang sehat dan demokratis. Hal ini menyebabkan legitimasi sosial program menjadi rapuh dan menurunkan tingkat partisipasi serta kepuasan penerima manfaat. Dalam perspektif Robert Putnam (1993), modal sosial dan partisipasi komunitas adalah kunci bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan dan efektivitas program. Ruang dialog yang terbuka dan inklusif diperlukan agar penerima manfaat tidak hanya menjadi objek bantuan, melainkan subjek aktif dalam pemberdayaan. Pendamping sosial memiliki peran sentral dalam menciptakan suasana komunikasi yang empatik dan membangun rasa kepemilikan atas program, sehingga mendorong partisipasi yang lebih besar dan legitimasi yang kuat (Setianingrum et al., 2025).

Berdasarkan kerangka dan fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama yang menjadi benang merah dalam memahami dinamika wacana kemiskinan dalam PKH di Kota Makassar. Pertama, *bagaimana konstruksi wacana kemiskinan yang dominan dalam pelaksanaan PKH membentuk representasi dan pemahaman tentang masyarakat miskin*. Kedua, *bagaimana kontestasi antara wacana resmi dan wacana tandingan dari penerima manfaat dan aktor sosial lainnya memengaruhi pelaksanaan program dan praktik pemberdayaan*. Ketiga, *bagaimana dampak dominasi wacana administratif terhadap tingkat partisipasi, legitimasi sosial, dan keberlanjutan PKH*. Dengan fokus tersebut, penelitian ini berusaha mengisi gap pemahaman antara teori dan praktik pelaksanaan PKH, khususnya dalam hal konstruksi wacana dan pemberdayaan masyarakat miskin. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif, sensitif terhadap konteks lokal, dan berorientasi pada pemberdayaan sosial yang nyata dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemahaman mengenai wacana kemiskinan dan bagaimana wacana tersebut digunakan dalam kebijakan sosial menjadi sangat penting untuk mengkaji efektivitas program-program pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam konteks ini, teori-

teori sosial yang berkaitan dengan kekuasaan, komunikasi, dan ruang publik menjadi kerangka konseptual yang relevan. Dua teori utama yang banyak digunakan dalam kajian wacana dan pemberdayaan sosial adalah teori Michel Foucault tentang power/knowledge dan teori Jurgen Habermas mengenai ruang publik deliberatif dan rasionalitas komunikatif.

Teori Power/Knowledge Michel Foucault

Michel Foucault dalam karyanya *Power/Knowledge* (1980) menjelaskan bahwa kekuasaan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral atau murni obyektif, melainkan selalu terkait dengan praktik kekuasaan yang membentuk dan mengendalikan subjek dan populasi. Dalam hal ini, wacana merupakan suatu sistem pengetahuan yang diproduksi secara sosial dan berfungsi untuk mengatur perilaku, identitas, dan relasi sosial dalam masyarakat.

Foucault dalam konteks kemiskinan menyoroti bagaimana wacana kemiskinan dibentuk melalui berbagai mekanisme administratif dan pelabelan yang digunakan oleh negara dan lembaga sosial. Data statistik, kriteria kelayakan, dan kebijakan resmi bukan sekadar alat pengukuran, tetapi juga teknologi kekuasaan yang membatasi dan mengkategorikan masyarakat miskin. Proses ini menghasilkan identitas sosial tertentu bagi kelompok miskin yang seringkali menempatkan mereka sebagai objek kontrol dan pengawasan, bukan sebagai subjek yang aktif dan memiliki suara dalam proses sosial (Foucault, 1980; Susilo & Suyono, 2019).

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), wacana kemiskinan yang diadopsi pemerintah sangat berorientasi pada pendekatan administratif dan normatif. Kriteria kelayakan yang kaku dan penggunaan data statistik sebagai dasar seleksi penerima manfaat merupakan refleksi dari praktik power/knowledge yang cenderung menstandarisasi dan mendisiplinkan masyarakat miskin. Akibatnya, kompleksitas dan nuansa kehidupan sosial budaya masyarakat miskin kurang terakomodasi, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi terhadap program (Setianingrum et al., 2025; Pramesti, Kadir, & Suriyani, 2024).

Foucault juga menunjukkan bahwa kekuasaan bukan hanya bersifat represif, tetapi juga produktif. Ini berarti bahwa kekuasaan menghasilkan berbagai bentuk resistensi dan alternatif wacana dari kelompok yang dikuasai. Dalam konteks PKH, resistensi ini muncul dalam bentuk wacana tandingan dari penerima manfaat dan pendamping sosial yang menuntut pengakuan atas pengalaman dan kebutuhan yang lebih nyata dan manusiawi. Resistensi ini berperan penting dalam membuka ruang dialog dan transformasi wacana kemiskinan yang lebih inklusif dan responsif (Foucault, 1980; Norlaili, Budiman, & Noorrahman, 2020).

Teori Ruang Publik dan Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas

Sementara Foucault menekankan relasi kekuasaan dalam produksi wacana, Jurgen Habermas (1989) fokus pada pentingnya ruang publik deliberatif sebagai arena demokrasi dan legitimasi sosial. Menurut Habermas, ruang publik adalah tempat di mana warga masyarakat dapat berdiskusi secara rasional, terbuka, dan egaliter untuk mencapai konsensus mengenai masalah bersama, termasuk kebijakan sosial.

Habermas mengembangkan konsep *rasionalitas komunikatif*, yang menekankan bahwa komunikasi yang bebas dari dominasi dan ketidaksetaraan sosial memungkinkan terjadinya pertukaran argumen yang jujur dan dialog yang produktif. Dalam konteks kebijakan sosial seperti PKH, keterlibatan masyarakat miskin dalam ruang publik deliberatif sangat penting

untuk memastikan bahwa program tidak hanya dijalankan secara top-down, tetapi juga berdasarkan kebutuhan dan aspirasi mereka sebagai subjek sosial yang aktif.

Namun, dalam praktiknya, terdapat ketimpangan akses terhadap ruang publik yang menghambat partisipasi masyarakat miskin dalam dialog sosial dan pengambilan keputusan. Ketimpangan ini biasanya muncul karena dominasi aktor-aktor kuat, termasuk birokrasi dan elit politik, yang membatasi ruang diskursus bagi kelompok rentan. Kondisi ini dapat menimbulkan alienasi, ketidakpercayaan, dan resistensi terhadap program-program pemerintah (Habermas, 1989; Setianingrum et al., 2025).

Pendamping sosial dan aktor masyarakat sipil seringkali berperan sebagai fasilitator dialog yang membantu membuka ruang komunikasi dua arah yang inklusif. Melalui pendekatan partisipatif ini, penerima manfaat PKH dapat merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan dalam proses pemberdayaan, yang meningkatkan legitimasi sosial dan efektivitas program (Norlaili, Budiman, & Noorrahman, 2020; Susilo & Suyono, 2019).

Integrasi Teori Foucault dan Habermas dalam Konteks PKH

Mengkaji Program Keluarga Harapan dari perspektif teori Foucault dan Habermas memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika wacana kemiskinan dan pemberdayaan sosial. Foucault membantu mengungkap bagaimana mekanisme kekuasaan melalui kebijakan dan data administrasi membentuk wacana resmi kemiskinan yang dapat mengalienasi penerima manfaat. Di sisi lain, Habermas memberikan kerangka untuk mengkaji bagaimana keterbukaan komunikasi dan ruang publik deliberatif dapat memfasilitasi partisipasi dan legitimasi sosial, yang sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan dan keberhasilan program.

Wacana kemiskinan dalam PKH bukanlah sesuatu yang statis atau tunggal, melainkan arena kontestasi antara wacana dominan dan wacana tandingan yang muncul dari praktik di lapangan. Pendamping sosial sebagai mediator komunikasi dan aktor masyarakat sipil memegang peranan penting dalam menjembatani dua dimensi ini. Pendekatan komunikasi yang dialogis dan partisipatif tidak hanya membuka ruang legitimasi sosial tetapi juga memberdayakan masyarakat miskin untuk berperan aktif dalam proses pemberdayaan (Setianingrum et al., 2025; Pramesti, Kadir, & Suriyani, 2024).

Metodologi

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konstruksi wacana kemiskinan, kontestasi wacana, serta dampaknya terhadap partisipasi dan legitimasi sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Makassar. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman, perspektif, dan makna sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Sugiyono, 2013).

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di Kota Makassar, sebagai salah satu wilayah dengan cakupan PKH yang cukup besar dan kompleksitas sosial budaya yang khas. Subjek penelitian terdiri dari 15 keluarga penerima manfaat PKH dan 3 pendamping sosial yang berperan langsung dalam pelaksanaan program. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling untuk memastikan informan yang dipilih memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terhadap fokus penelitian (Patton, 2015).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan keluarga penerima manfaat dan pendamping sosial untuk menggali narasi pengalaman, pandangan, serta persepsi mereka terkait pelaksanaan PKH dan dinamika wacana kemiskinan. Pertanyaan disusun berdasarkan kerangka teori dan rumusan masalah penelitian (Creswell, 2014).

2. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan observasi selama kegiatan pendampingan PKH di lapangan untuk memahami konteks sosial budaya serta interaksi sosial yang terjadi antara pendamping dan penerima manfaat (DeWalt & DeWalt, 2011).

3. Studi Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan terhadap kebijakan, pedoman, dan laporan resmi terkait PKH dari pemerintah pusat dan daerah untuk memahami konteks formal dan kerangka operasional program (Bowen, 2009).

Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul dari wawancara dan observasi lapangan, berikut ini contoh penerapan analisis tematik:

Reduksi Data

Dari transkrip wawancara dengan 15 penerima manfaat PKH dan 3 pendamping sosial, peneliti mengidentifikasi banyak pengulangan isu seperti birokrasi rumit, ketidakakuratan data penerima, serta ketidakcocokan kriteria program dengan kondisi riil keluarga. Data yang tidak terkait langsung dengan fokus penelitian, misalnya cerita personal yang tidak relevan, disisihkan.

Penyajian Data

Data yang sudah dipilah dikelompokkan dalam beberapa tema utama, misalnya:

- **Wacana Kemiskinan dan Kriteria Program:** Kutipan yang menunjukkan bagaimana penerima manfaat merasa seperti “nomor” dalam data statistik dan mengeluhkan kriteria yang tidak fleksibel.
- **Resistensi dan Kontestasi Wacana:** Narasi tentang penolakan pelabelan dan usaha penerima manfaat merebut narasi tentang kondisi mereka.
- **Peran Pendamping Sosial:** Deskripsi interaksi pendamping dengan penerima manfaat sebagai mediator dialog dan fasilitator partisipasi.
- **Dampak terhadap Partisipasi dan Legitimasi:** Uraian mengenai bagaimana wacana yang dominan mempengaruhi tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat.

Penarikan Kesimpulan

Analisis menemukan bahwa dominasi wacana administratif mengarah pada marginalisasi pengalaman penerima manfaat dan menimbulkan resistensi. Pendamping sosial berperan penting dalam membangun dialog inklusif yang membuka ruang partisipasi. Namun, hambatan birokrasi dan ketidakakuratan data tetap menjadi kendala signifikan yang harus diatasi agar legitimasi dan keberlanjutan PKH dapat terjaga.

Validitas dan Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi dari penerima manfaat, pendamping sosial, dan

dokumen resmi. Selain itu, dilakukan pengecekan anggota (member checking) untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan pemahaman subjek penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

Etika Penelitian

Peneliti memastikan prinsip-prinsip etika penelitian terpenuhi dengan memperoleh persetujuan informan secara sukarela melalui informed consent, menjaga kerahasiaan identitas dan data pribadi, serta menghormati hak-hak subjek penelitian selama proses pengumpulan dan pelaporan data (Orb, Eisenhauer, & Wynaden, 2001).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan dan Konstruksi Wacana Kemiskinan dalam PKH

Wacana kemiskinan yang dibangun dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Makassar tampak sangat berorientasi pada pendekatan administratif dan normatif yang didasarkan pada data statistik dan kriteria kelayakan yang baku. Para penerima manfaat secara konsisten menyatakan bahwa wacana resmi ini sering tidak menggambarkan realitas kompleks yang mereka alami sehari-hari.

Salah seorang penerima manfaat, Ibu FH, mengungkapkan kekesalannya mengenai pelabelan administrasi yang kerap kali terasa jauh dari kondisi nyata: “*Saya merasa seperti hanya nomor di data itu, padahal kehidupan kami banyak masalah yang tidak bisa dilihat dari angka-angka saja*”.

Hal ini diperkuat oleh Pak HN, yang menambahkan bahwa kebijakan yang kaku dan berbasis data tersebut tidak cukup menangkap berbagai aspek ketidakadilan sosial yang dialami masyarakat miskin: “*Data itu membuat kami masuk kategori, tapi banyak kebutuhan kami yang tidak terlihat dan tidak terlayani*”.

Pendamping sosial, juga menegaskan bahwa wacana kemiskinan resmi tersebut cenderung formal dan terstandarisasi, sehingga seringkali mengabaikan konteks sosial dan budaya lokal yang sangat memengaruhi keseharian penerima manfaat: “*Kriteria program itu penting, tapi terkadang kaku dan kurang sensitif terhadap realitas yang kami jumpai di lapangan*”.

Sementara itu, beberapa aktor sosial dan akademisi turut menyoroti bagaimana konstruksi wacana ini membatasi pemahaman tentang kemiskinan hanya sebatas dimensi ekonomi atau material, tanpa memperhatikan dimensi struktural dan kultural yang juga menentukan posisi sosial masyarakat miskin. Sebagaimana dikatakan oleh seorang akademisi: “*Wacana kemiskinan harus membuka ruang bagi narasi pengalaman masyarakat sendiri, bukan hanya mengandalkan statistik dan kriteria administrasi*”.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa wacana kemiskinan yang dominan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Makassar sangat terfokus pada pendekatan administratif dan normatif yang ketat. Pemerintah menggunakan data statistik dan kriteria kelayakan yang telah terstandarisasi sebagai instrumen utama untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial tersebut. Pendekatan yang bersifat kuantitatif ini mempermudah pelaksanaan birokrasi serta standarisasi distribusi bantuan, namun, dari sudut pandang para penerima manfaat, wacana ini cenderung dirasakan sangat mekanistik dan kurang mampu mencerminkan kompleksitas dan dinamika kehidupan sosial-ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan kata lain, program ini lebih banyak mengkonstruksi kemiskinan

sebagai angka dan kategori administratif daripada sebagai fenomena sosial yang kaya dengan makna dan konteks lokal.

Teori Michel Foucault mengenai *power/knowledge* (1980) sangat relevan untuk menganalisis fenomena ini. Foucault menegaskan bahwa pengetahuan yang dihasilkan melalui sistem administratif, seperti data statistik dan kriteria kelayakan, bukanlah entitas netral, melainkan merupakan teknologi kekuasaan yang berfungsi untuk mengontrol, mendisiplinkan, dan mengatur masyarakat. Dalam konteks PKH, penggunaan data tersebut tidak hanya sekadar menandai siapa yang miskin, melainkan juga membentuk identitas sosial masyarakat miskin secara kaku, memposisikan mereka sebagai objek administrasi yang harus dikendalikan sesuai dengan aturan dan prosedur. Akibatnya, pengalaman subjektif dan nuansa sosial budaya yang beragam dalam masyarakat miskin seringkali tidak terakomodasi dalam kebijakan tersebut. Hal ini berimplikasi pada distorsi pemahaman tentang kemiskinan yang tereduksi hanya pada dimensi ekonomi dan administratif, sehingga faktor sosial, budaya, dan kultural yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat miskin menjadi terabaikan (Setianingrum et al., 2025; Susilo & Suyono, 2019).

Pendamping sosial yang terlibat di lapangan pun mengakui bahwa kriteria baku dan formal yang digunakan dalam PKH tidak selalu relevan dan tidak cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mendesak maupun karakteristik unik keluarga yang ada. Kondisi keluarga besar, kebutuhan yang tiba-tiba muncul, dan konteks sosial budaya lokal, yang berperan besar dalam menentukan cara keluarga miskin bertahan dan beradaptasi, sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dalam desain program. Akibatnya, terdapat jarak antara kebijakan formal yang berlaku dan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat miskin, sehingga program PKH belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan riil mereka (Pramesti, Kadir, & Suriyani, 2024; Mulyadi & Sari, 2021).

Kondisi ini menegaskan kritik yang disampaikan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann dalam teori konstruksi sosial realitas mereka (1966), yang menyatakan bahwa realitas sosial tidak semata-mata merupakan hasil konstruksi administratif atau fakta objektif, melainkan juga merupakan hasil konstruksi makna yang dibangun oleh pengalaman dan narasi masyarakat itu sendiri. Dalam konteks PKH, hal ini berarti bahwa pemahaman tentang kemiskinan tidak boleh hanya bergantung pada angka dan kategori formal, tetapi harus membuka ruang bagi narasi pengalaman masyarakat miskin yang hidup dalam berbagai kondisi sosial yang berbeda-beda. Dengan demikian, pengembangan program yang lebih responsif dan adaptif terhadap konteks sosial budaya lokal sangat diperlukan agar pemberdayaan yang dilakukan benar-benar dapat menyentuh akar persoalan dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

Pembentukan wacana kemiskinan yang dominan dalam PKH harus dievaluasi ulang untuk memberi ruang bagi pengakuan pengalaman dan kebutuhan subjek yang menjadi target program. Pendekatan yang lebih holistik, yang mempertimbangkan dimensi sosial-kultural dan struktural, dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas intervensi. Studi oleh Setianingrum et al. (2025) dan Susilo & Suyono (2019) menekankan perlunya reformasi kebijakan yang mengintegrasikan data kuantitatif dengan wawasan kualitatif yang diperoleh dari partisipasi langsung masyarakat miskin. Pendamping sosial, sebagai jembatan antara kebijakan formal dan masyarakat, memegang peranan krusial dalam mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat ke dalam proses perumusan dan evaluasi program.

Perlu adanya upaya pengembangan kapasitas pendamping sosial dalam memahami kompleksitas sosial budaya dan dalam menerapkan pendekatan komunikasi yang sensitif. Dengan demikian, program PKH tidak hanya dilaksanakan sebagai program bantuan sosial yang normatif dan administratif, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan sosial yang menghormati keberagaman dan pengalaman hidup masyarakat miskin secara nyata dan holistik.

Kontestasi Wacana dalam Praktik Pemberdayaan

Praktik pemberdayaan PKH, muncul wacana tandingan dari penerima manfaat, pendamping, dan berbagai aktor sosial yang menunjukkan resistensi terhadap wacana resmi. Mereka menolak pelabelan dan kriteria yang dirasa tidak adil dan tidak sensitif terhadap situasi lokal, sehingga membentuk dialog kritis dan ketegangan yang berpotensi memunculkan transformasi wacana.

Salah satu penerima manfaat, Bapak YF, mengekspresikan perlawanan terhadap label yang melekat: *“Kami bukan hanya angka atau statistik. Kami punya cerita dan masalah yang lebih rumit. Program ini harus mendengar suara kami”*.

Pendamping sosial, Ibu LA, menjelaskan bagaimana peranannya bukan hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga menyalurkan aspirasi masyarakat: *“Kadang kami jadi mediator antara kebijakan yang kaku dengan kebutuhan nyata masyarakat. Kami berusaha membawa suara mereka agar didengar oleh pengambil kebijakan”*.

Aktivis sosial di lapangan juga menekankan perlunya dialog inklusif yang membuka ruang partisipasi masyarakat miskin sebagai subjek wacana, bukan sekadar objek program: *“Kontestasi ini penting untuk memastikan program tidak hanya top-down, tapi juga bottom-up, menghargai pengalaman dan kebutuhan lokal”*.

Di sisi lain, ketegangan antara wacana resmi dan tandingan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun resistensi terhadap program. Beberapa penerima manfaat mengaku pernah merasa enggan mengikuti program karena ketidakpuasan terhadap kriteria dan mekanisme yang dianggap tidak adil: *“Kadang saya merasa capek dengan aturan yang tidak jelas dan bantuan yang tidak sesuai harapan”*.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Makassar, wacana resmi tentang kemiskinan yang bersifat administratif sering kali menghadapi resistensi dari berbagai aktor sosial, khususnya para penerima manfaat dan pendamping sosial. Mereka menolak pelabelan yang dianggap tidak adil dan tidak mampu merefleksikan konteks sosial dan realitas kehidupan mereka yang kompleks. Wacana tandingan ini muncul sebagai upaya merebut kembali ruang narasi yang lebih otentik dan manusiawi, di mana masyarakat miskin tidak hanya dipandang sebagai angka statistik atau objek kebijakan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi yang unik dan beragam (Setianingrum et al., 2025; Susilo & Suyono, 2019).

Teori Michel Foucault (1980) tentang power/knowledge sangat relevan untuk memahami fenomena ini. Foucault mengemukakan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga produktif, yang menghasilkan resistensi sebagai bagian tak terpisahkan dari hubungan kekuasaan itu sendiri. Dalam konteks PKH, resistensi yang muncul dari penerima manfaat dan pendamping bukan sekadar penolakan, melainkan proses dialektis yang memungkinkan transformasi wacana kemiskinan menjadi lebih inklusif dan sensitif terhadap realitas lokal dan kebutuhan masyarakat miskin yang sebenarnya (Pramesti, Kadir, & Suriyani,

2024; Mulyadi & Sari, 2021). Proses ini membuka ruang bagi narasi baru yang lebih humanistik dan kontekstual, yang dapat memperbaiki legitimasi sosial program sekaligus memperkuat peran pemberdayaan masyarakat.

Peran pendamping sosial dan aktor masyarakat sipil sangat strategis dalam konteks ini sebagai mediator yang menghubungkan wacana resmi dengan wacana masyarakat di lapangan. Mereka berfungsi memfasilitasi dialog yang inklusif dan partisipatif, sebagaimana dijelaskan oleh teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas (1984). Habermas menegaskan pentingnya dialog terbuka, rasional, dan egaliter sebagai sarana membangun legitimasi sosial dan konsensus dalam masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan komunikasi yang partisipatif, pendamping sosial dapat membuka ruang bagi keterlibatan aktif penerima manfaat dalam proses pemberdayaan, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang berperan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan (Norlaili, Budiman, & Noorrahman, 2020).

Pendekatan dialogis ini tidak hanya meningkatkan partisipasi dan keterlibatan sosial, tetapi juga membantu mengatasi berbagai hambatan budaya dan sosial yang selama ini membatasi akses dan efektivitas program. Pendamping sosial yang mampu membangun komunikasi empatik dan inklusif dapat mengurangi ketegangan antara wacana resmi dan wacana masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa kepercayaan dan solidaritas sosial yang menjadi fondasi penting dalam keberhasilan program PKH (Setianingrum et al., 2025). Dalam hal ini, keberhasilan PKH tidak hanya diukur dari ketersediaan bantuan finansial, tetapi juga dari keberhasilan membangun hubungan sosial yang mendukung pemberdayaan komunitas secara berkelanjutan.

Selain itu, studi Norlaili, Budiman, dan Noorrahman (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui dialog yang terbuka dan inklusif mendorong terciptanya modal sosial yang kuat, yang secara signifikan meningkatkan efektivitas program. Modal sosial ini berupa jaringan dukungan sosial, kepercayaan, dan norma kolektif yang membantu mengatasi ketidakpastian dan memperkuat komitmen keluarga penerima manfaat terhadap kewajiban program. Dengan kata lain, transformasi wacana melalui kontestasi dan dialog partisipatif memungkinkan PKH berfungsi tidak hanya sebagai alat distribusi bantuan, tetapi juga instrumen pemberdayaan sosial yang mampu merespons dinamika lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin secara menyeluruh (Adhayati, Budiman, & Noorrahman, 2020).

Dampak Wacana terhadap Partisipasi dan Legitimasi

Wacana kemiskinan yang didominasi oleh pendekatan administratif berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat miskin dalam proses pemberdayaan. Penelitian lapangan mengungkapkan bahwa ruang publik deliberatif yang ideal, yang memungkinkan dialog dan partisipasi bebas masyarakat miskin, belum sepenuhnya terwujud.

Ibu SH, seorang penerima manfaat, mengungkapkan ketidakpercayaan yang timbul akibat minimnya ruang diskusi terbuka: *“Kami jarang diberi kesempatan bicara soal program. Kalau pun ada, rasanya tidak sampai ke pengambil keputusan”*.

Pendamping sosial menegaskan pentingnya pembangunan ruang dialog yang lebih inklusif agar legitimasi sosial program dapat diperkuat: *“Legitimasi program hanya bisa tumbuh jika penerima manfaat merasa dihargai dan suara mereka didengar”*.

Salah satu aktor sosial menyatakan bahwa rendahnya kepercayaan ini berpotensi menghambat keberlanjutan program dan memunculkan resistensi sosial yang dapat merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat miskin: "*Tanpa legitimasi sosial, program bisa kehilangan daya guna dan justru memperburuk kondisi sosial*".

Pengembangan ruang publik yang terbuka dan partisipatif menjadi sebuah urgensi agar wacana kemiskinan dapat bertransformasi secara inklusif dan responsif, membangun konsensus bersama masyarakat miskin sendiri sebagai subjek pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan gagasan Jurgen Habermas (1984) tentang pentingnya komunikasi dan deliberasi sebagai landasan legitimasi sosial.

Dominasi wacana administratif yang kaku dan normatif dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dampak signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat miskin sebagai penerima manfaat. Pendekatan yang menitikberatkan pada prosedur baku dan penilaian kuantitatif membuat ruang partisipasi dialogis dan kritis menjadi sangat terbatas. Akibatnya, ruang publik deliberatif ideal, yang dalam teori Habermas (1984) diartikan sebagai arena sosial di mana warga masyarakat dapat berdiskusi secara terbuka dan rasional untuk mencapai konsensus bersama, belum dapat terbentuk secara optimal dalam konteks PKH di Kota Makassar. Hal ini secara langsung memengaruhi legitimasi sosial program, sebab penerima manfaat merasa tidak memiliki peran berarti dalam proses pengambilan keputusan, evaluasi, dan penyesuaian program berdasarkan kebutuhan dan realitas mereka (Putnam, 1993; Susilo & Suyono, 2019).

Legitimasi sosial yang rendah berdampak pada sikap apatis dan ketidakpatuhan masyarakat miskin terhadap persyaratan program. Mereka cenderung melihat PKH semata-mata sebagai program birokrasi yang mengekang, bukan sebagai instrumen pemberdayaan yang mengakui hak dan suara mereka sebagai subjek sosial. Dalam perspektif teori power/knowledge Michel Foucault (1980), dominasi wacana administratif ini merupakan bentuk kekuasaan yang memproduksi subjek-subjek sosial yang terkontrol dan distandarisasi, sehingga pengalaman dan narasi lokal mereka terpinggirkan dan diabaikan. Ini menimbulkan gap antara kebijakan formal dan praktik sosial di lapangan, yang berujung pada resistensi pasif maupun aktif dari penerima manfaat.

Oleh karena itu, keberhasilan PKH tidak hanya tergantung pada seberapa besar bantuan yang disalurkan, tetapi lebih pada bagaimana program mampu membangun ruang dialog yang inklusif, terbuka, dan partisipatif. Pendekatan komunikasi dua arah yang memungkinkan penerima manfaat untuk berbicara, didengar, dan dilibatkan secara nyata dalam proses perumusan kebijakan dan evaluasi program menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, pendamping sosial memegang peranan krusial sebagai fasilitator dialog yang membangun kepercayaan dan rasa memiliki keluarga miskin terhadap program (Setianingrum et al., 2025). Pendamping yang komunikatif dan empatik mampu menciptakan kondisi di mana penerima manfaat merasa dihargai sebagai subjek pemberdayaan, bukan sekadar objek bantuan, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mematuhi persyaratan program.

Penguatan modal sosial dalam komunitas penerima manfaat juga menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan program. Menurut Robert Putnam (1993), modal sosial—yang meliputi jaringan sosial, kepercayaan, dan norma bersama—mendorong partisipasi kolektif yang lebih efektif. Dalam PKH, modal sosial ini terbentuk melalui aktivitas bersama seperti pertemuan rutin dan edukasi yang difasilitasi oleh

pendamping sosial. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga membuka ruang bagi refleksi kritis dan kolaborasi komunitas dalam menghadapi tantangan kemiskinan (Norlaili, Budiman, & Noorrahman, 2020).

Lebih jauh, ketidakmampuan membangun ruang publik deliberatif juga mencerminkan keterbatasan pendekatan program yang masih bersifat top-down, yang kurang memperhatikan konteks sosial budaya lokal dan aspirasi penerima manfaat. Pendamping sosial sering menghadapi dilema antara menjalankan prosedur administratif dan mengakomodasi kebutuhan serta nilai budaya masyarakat. Hambatan ini kerap menghambat dialog terbuka dan inklusif, yang sangat dibutuhkan agar program dapat beradaptasi secara dinamis dengan kompleksitas sosial lapangan (Pramesti, Kadir, & Suriyani, 2024).

Pembentukan ruang dialog yang sehat dan partisipatif dalam PKH harus didukung oleh reformasi kebijakan yang mendorong desentralisasi dan pelibatan aktif komunitas dalam pengambilan keputusan. Pendamping sosial perlu diberikan pelatihan komunikasi kritis dan teknik fasilitasi partisipatif agar dapat menjalankan peran mediator secara optimal, tidak hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memberdayakan (Setianingrum et al., 2025).

Membangun ruang publik deliberatif yang inklusif merupakan prasyarat penting untuk mengatasi gap wacana dan legitimasi sosial yang selama ini menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan PKH. Dengan demikian, program tidak hanya akan berfungsi sebagai mekanisme distribusi bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang berkelanjutan dan berakar pada partisipasi masyarakat miskin sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan sosial ekonomi mereka.

4. KESIMPULAN

Wacana kemiskinan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Makassar terbukti merupakan konstruksi sosial-politik yang dominan bersifat administratif dan teknokratis. Wacana resmi ini sangat berfokus pada data statistik dan kriteria kelayakan yang baku, yang walaupun memudahkan proses birokrasi, ternyata tidak sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat miskin yang heterogen. Akibatnya, pengalaman subjektif dan realitas sosial budaya lokal masyarakat miskin kurang mendapatkan ruang dalam kebijakan, sehingga memunculkan gap antara kebijakan formal dan kebutuhan riil masyarakat.

Kontestasi wacana antara wacana resmi pemerintah dengan wacana tandingan dari penerima manfaat, pendamping sosial, dan aktor masyarakat sipil mengindikasikan adanya resistensi yang berpotensi melahirkan transformasi wacana kemiskinan yang lebih inklusif dan responsif. Transformasi ini sangat penting agar program PKH tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang menghargai keberagaman pengalaman masyarakat miskin.

Selain itu, dominasi wacana administratif yang kaku berdampak pada rendahnya partisipasi aktif masyarakat miskin dalam program. Ruang publik deliberatif yang inklusif dan komunikatif belum terbentuk secara optimal, sehingga legitimasi sosial program menjadi rapuh. Hal ini menyebabkan sikap apatisme, resistensi, dan menurunnya kepatuhan penerima manfaat terhadap persyaratan program.

Pendamping sosial memegang peranan kunci dalam membangun ruang dialog yang terbuka dan empatik, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat miskin dalam proses pemberdayaan. Penguatan modal sosial melalui jaringan sosial, kepercayaan, dan norma kolektif di komunitas penerima manfaat turut memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program PKH.

Keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan finansial, melainkan juga oleh kemampuan program menciptakan ruang partisipasi sosial yang inklusif, dialogis, dan sensitif terhadap konteks sosial budaya lokal. Reformasi kebijakan dan pengembangan kapasitas pendamping sosial menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi ketimpangan wacana dan meningkatkan efektivitas program dalam jangka panjang.

Rekomendasi

1. Mendorong Pembangunan Ruang Publik Deliberatif yang Inklusif

Pemerintah dan pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) perlu menciptakan dan mengembangkan ruang publik deliberatif yang benar-benar inklusif. Ruang ini harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk menyuarakan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi mereka secara bebas dan terbuka. Dengan demikian, kebijakan dan implementasi program dapat lebih responsif terhadap realitas sosial dan kultural masyarakat sasaran, bukan hanya berdasarkan data administratif semata.

2. Mengakomodasi Wacana Tandingan dan Narasi Alternatif dalam Kebijakan Sosial

Perumusan dan evaluasi kebijakan sosial hendaknya membuka ruang bagi wacana tandingan dan narasi alternatif yang berasal dari penerima manfaat, pendamping sosial, dan aktor masyarakat sipil. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa program seperti PKH tidak hanya menjadi instrumen top-down yang bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan konteks lokal yang beragam. Pengakuan terhadap pluralitas suara akan memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan sosial.

3. Memperkuat Kapasitas Pendamping Sosial dan Aktor Masyarakat Sipil dalam Fasilitasi Dialog dan Pemberdayaan

Pendamping sosial dan aktor masyarakat sipil memegang peranan penting sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat miskin. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mereka dalam komunikasi kritis, fasilitasi dialog inklusif, dan pemberdayaan komunitas sangat krusial. Pelatihan berkelanjutan dan penyediaan sumber daya yang memadai akan membantu mereka menjalankan fungsi ini secara efektif, sehingga dapat membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

4. Melakukan Evaluasi Berkelanjutan terhadap Wacana dan Praktik PKH agar Lebih Adaptif terhadap Realitas Sosial

Evaluasi program PKH perlu dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif, tidak hanya dari aspek administratif dan keuangan, tetapi juga dari sudut pandang wacana sosial dan partisipasi masyarakat. Evaluasi ini harus mengidentifikasi ketimpangan, hambatan, dan peluang transformasi wacana kemiskinan, sehingga pelaksanaan program dapat terus disesuaikan dengan dinamika sosial budaya dan kebutuhan masyarakat miskin. Pendekatan evaluasi yang partisipatif dan dialogis akan mendukung perbaikan berkelanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayati, N., Budiman, A., & Noorrahman, M. F. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(1), 706–715.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Dewiyana, R., & Gugun, A. (2022). Mekanisme resistensi dalam program bantuan sosial. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 12(1), 90–110.
- Durkheim, E. (1893). *The division of labor in society*.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Prentice-Hall.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action*. Beacon Press.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Hasanah, S., Siswati, R., & Darajat, M. (2023). Partisipasi dan deliberasi dalam Program Keluarga Harapan. *Jurnal Sosial dan Politik*, 9(2), 120–138.
- Mulyadi, D., & Sari, N. P. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 5(2), 123–136.
- Norlaili, A., Budiman, A., & Noorrahman, M. F. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Amuntai*.
- Polanyi, K. (1944). *The great transformation*. Beacon Press.
- Pramesti, I., Kadir, A., & Suriyani, B. B. (2024). Analisis transparansi Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesejahteraan sosial di Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat. *Trajectories: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 39–54.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Putra, A. (2019). Analisis dampak program bantuan sosial di Sulawesi Selatan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 3(1), 45–56.
- Setianingrum, D., et al. (2025). Analisis transformasi wacana kemiskinan dalam Program Keluarga Harapan. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*.
- Susilo, E. V., & Suyono, D. (2019). Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kertasinduyasa Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes tahun 2017. *Indonesian Governance Journal*, 2(2), 10–15.

Tamuntuan, C. (2023). Analisis diskursus kemiskinan dan pemberdayaan dalam PKH di Kota Makassar. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 15(1), 45–62.

Warman, I., & Asrizon, S. (2021). Sistem monitoring dan evaluasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berbasis web di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung. *Jurnal Teknoif*, 9(2), 92–96.